

Pemda Bisa Pantau Implementasi JKN-KIS Lewat Dashboard JKN

Jakarta (08/07/2020) – Guna mengoptimalkan penyelenggaraan Program JKN-KIS di daerah, BPJS Kesehatan membuka akses Dashboard JKN kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Langkah ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, yakni dalam rangka membantu Pemda mengambil kebijakan terkait bidang kesehatan di daerahnya masing-masing, BPJS Kesehatan wajib menyediakan data dan informasi secara berkala.

“Demi menyelenggarakan tata kelola data dan informasi yang efektif dan efisien, BPJS Kesehatan membangun database terpadu yang digunakan bersama-sama untuk penyelenggaraan Program JKN-KIS. Ini kami realisasikan dengan membuka akses Dashboard JKN bagi Pemda,” kata Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno, dalam acara Weekly Webinar “Pembenahan Ekosistem Program JKN-KIS” yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Kesehatan Indonesia, Rabu (08/07).

Mundiharno mengatakan, Dashboard JKN memuat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, jumlah kunjungan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), jumlah rujukan peserta FKTP, 10 diagnosa tertinggi di FKTP, jumlah kasus di rumah sakit, data utilisasi penyakit katastropik, serta 10 kasus tertinggi di rumah sakit.

“Pemda tentu dapat mengakses data sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Kami juga melakukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas pemanfaatan informasi bagi setiap Pemda,” jelas Mundiharno.

Pada kesempatan yang sama, Mundiharno mengatakan bahwa BPJS Kesehatan perlu dukungan dan kerja sama dengan begitu banyak pemangku kepentingan, yang disebut sebagai ekosistem JKN-KIS. Menurutnya, ekosistem Program JKN-KIS yang sehat akan tercipta apabila peran serta tugas pokok dan fungsi stakeholder sesuai dengan regulasi, serta ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh *stakeholder*.

“Misalnya dari segi regulator, apakah regulasi yang dikeluarkan instansi terkait mendorong terjadinya pelayanan yang seharusnya, misalnya ada standar pelayanan yang sama dari masing-masing jenis pelayanan kedokteran. Lalu dari segi data, bagaimana ekosistem akan membuat data itu verified dan valid, serta hal-hal lainnya,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa peran Pemda dalam membangun ekosistem ini juga penting, antara lain meliputi pendaftaran peserta, pembayaran iuran, dan peningkatan mutu layanan.

“Dari BPJS Kesehatan, bagaimana membangun layanan yang memudahkan peserta dan memastikan peserta terlayani dengan baik. Yang tidak kalah penting juga yaitu kesadaran masyarakat membayar iuran karena ini pun termasuk ekosistem. Kita harus bekerja sama menyehatkan ekosistem JKN-KIS,” katanya.

Prof. Budi Hidayat : JKN merupakan pilihan kebijakan ideal yang diakui dunia. Kehadiran JKN-KIS diikuti oleh sejumlah reformasi yang merombak landscaping sistem kesehatan Indonesia.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Kantor Pusat

+62 21 424 6063

Website : www.bpjs-kesehatan.go.id

Twitter : @BPJSKesehatanRI

Instagram : @bpjskesehatan_ri

Facebook : BPJS Kesehatan

Youtube : BPJS Kesehatan

Kompasiana : BPJS Kesehatan

Kaskus : bpjskesehatan

PRESS RELEASE**Regional Governments Can Monitor Implementation of JKN-KIS Through the JKN Dashboard**

Jakarta (07/08/2020) - In order to optimize the implementation of the JKN-KIS Program in the regions, BPJS Kesehatan opens JKN Dashboard access for the Regional Governments (Pemda). This step is in accordance with Presidential Regulation No. 82 of 2018, which is in order to help Regional Governments take policies related to health in their respective regions, BPJS Kesehatan is required to provide data and information on a regular basis.

"For the sake of organizing effective and efficient data and information governance, BPJS Kesehatan has built an integrated database that is used together to implement the JKN-KIS Program by opening the JKN Dashboard access for Regional Governments," said Director of Development Planning and Risk Management of BPJS Kesehatan, Mundiharno, in the Weekly Webinar "Improving the JKN-KIS Program Ecosystem" organized by the Indonesian Health Consultants Association, Wednesday (08/07) .

Mundiharno said, the JKN Dashboard contained Universal Health Coverage (UHC) achievement data, JKN-KIS participant profiles, health facilities that collaborate with BPJS Kesehatan, the number of visits to First Level Health Facilities (FKTP), the number of FKTP participant who get the referrals, the 10 highest diagnoses at FKTP , number of cases in hospital, catastrophic disease utilization data, and 10 highest cases at hospital.

"Regional Governments can certainly access data in accordance with their respective work areas. We also conduct socialization and increase the capacity of information utilization for each Regional Government," explained Mundiharno.

On the same occasion, Mundiharno said that BPJS Kesehatan needs the support and cooperation of so many stakeholders, which is called JKN-KIS ecosystem. According to him, a healthy JKN-KIS Program ecosystem will be created if the roles and the functions of stakeholders are in accordance with regulations, and there is good communication and coordination from all stakeholders.

"For example, in terms of regulators, whether regulations issued by related agencies support the occurrence of services, for example there are the same service standards for each type of medical service. Then in terms of data, how the ecosystem will make the data verified and valid, as well as other things, "he said.

He also said that the role of the Regional Government in developing this ecosystem was also important, including on the registration of participants, payment of contributions, and improvement of service quality.

"BPJS Kesehatan duties is to build services that facilitate participants and ensure participants are well served. No less important thing is the awareness of the community to pay contributions because this also includes the ecosystem. We must work together to improve the JKN-KIS ecosystem, "he said.

Prof. Budi Hidayat: JKN is an ideal policy choice that is recognized worldwide. The presence of JKN-KIS was followed by a number of reforms which overhauled the landscape of Indonesian health system.
